



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN MEDIA ONLINE RRI MANOKWARI
TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

NOMOR: W31.HH.04.05-04

NOMOR: 006/PKS/RRI.Mnk/BID-LPU/02/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|---------|--------------------------------|
| 1. Nama | : Drs. Piet Bukorsyom, SH., MH |
| Jabatan | : Kepala Kantor Wilayah |
| Alamat | : Jln. Abraham O. Attururi |

Bertindak sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 2. Nama | : Ir. Sulistiyanto Istifarulah, MM |
| Jabatan | : Kepala LPP RRI Manokwari |
| Alamat | : Jln. Merdeka No. 68 Manokwari |

Bertindak sebagai Kepala LPP RRI Manokwari yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan **PERJANJIAN KERJA SAMA**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melalui LPP RRI Manokwari;
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat di LPP RRI Manokwari.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA

- a) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan *press release* atau bahan informasi berita kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bukti tayangan dan/atau tautan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang tayang/terbit;
- c) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang terbit sesuai dengan nilai pembayaran yang disetujui, yaitu Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) per tahun termasuk pajak dengan rincian 240 Berita Selama 1 Tahun.

(2) PIHAK KEDUA

a) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**;

b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- Melakukan peliputan secara langsung pada *event* tertentu dan/atau Jika dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat di wilayah kerja;
- Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** akan melakukan konfirmasi isi berita kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita;
- Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dalam bentuk tautan berita yang membuktikan berita telah dimuat ke **PIHAK PERTAMA**;
- Berkewajiban untuk melakukan publikasi berita kegiatan kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat di media **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 x 24 Jam sejak *press release* dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat;

(4) **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

PASAL 4

SISTEM PEMBAYARAN

(1) Pembayaran akan dilakukan di awal perjanjian.

(2) Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke Kas Negara melalui Billing Simponi.

PASAL 5
MASA WAKTU KERJASAMA

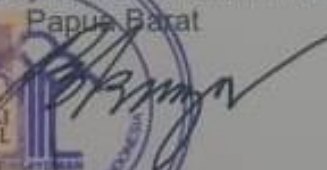
- (1) Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KEDUA**, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua **PIHAK** serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari;
- (3) Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan **PIHAK PERTAMA**, tidak lagi menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, begitu pula sebaliknya.

Demikian perjanjian KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Manokwari, 9 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Atas Nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Papua Barat



Dr. Piet Bukensyom, SH., MH.

PIHAK KEDUA

Atas Nama
LPP RRI Manokwari



Ir. Sulistyanto Istifarulah, MM.